

**SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM**  
**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LANGKIDDI KECAMATAN BAJO**  
**KABUPATEN LUWU**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

Basri Amat

10564 01878 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN  
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LANGKIDI  
KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

**BASRI AMAT**

Nomor Stambuk : 105640187814



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan  
Program Pembangunan Infrastruktur Didesa Langkiddi  
Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Nama Mahasiswa : Basri Amat

Nomor Stambuk : 10564 01878 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

  
Handam, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos. M.Si



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima penerimaan TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0013/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Selasa, 26 Februari 2019.



  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

### Penguji:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
4. A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

  
( )  
  
( )  
  
( )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Basri Amat

Nomor Stambuk : 10564 01878 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 28 Februari 2018

Yang menyatakan,



Basri Amat

## ABSTRAK

**BASRI AMAT. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu ( dibimbing oleh Hj. Andi Nuraeni Aksa dan Handam).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program pembangunan infrastruktur direalisasikan sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran, untuk masyarakat Desa di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program di Bidang Pembangunan di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu juga melalui observasi hasil-hasil realisasi dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Program Bidang Pembangunan Desa di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa program-program yang direalisasikan berdaya guna bagi masyarakat desa. Keberhasilan tersebut dapat dikatakan cukup efektif karena masyarakat telah merasakan dampak dan manfaatnya.

**Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar .

Ucapan terima kasih yang sebesar-sebesaranya . penulis ucapkan untuk kedua orang tua penulis, M. Amat Lonjo dan Hamri, yang telah mendidik dan merawat penulis dari kecil sampai saat ini, hingga penulis bisa menapaki jenjang pendidikan yang lebih layak lagi. Terima kasih kepada kakak dan adik saya yang selalu ada buat saya dalam susah maupun senang. Terima kasih untuk setiap perjuangan dan juga do'anya,. Tidak lupa juga penulis haturkan banyak terima kasih kepada keluarga besar, dari ayah dan ibu (om, tante, sepupu dan kerabat serta sahabat dekat penulis lainnya yang selalu memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi dengan cepat.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adanya

dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan staf.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku penasehat akademik selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.
4. Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Handam, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammadiyah, MM, bapak Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si, dan Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku dewan penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
6. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 dan teman-teman Kelas A Ilmu Pemerintahan 2014 yang selalu makan bersama apa adanya,

kerja tugas bersama sampai pagi dan saling mengingatkan satu sama lain baik itu hal positif maupun negatif.

7. Yulis Aria Suganda yang selalu kasih semangat agar tidak putus asa dalam mengerjakan skripsi saya.



Makassar, 28 Februari 2018

Basri Amat

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Pengajuan Skripsi.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xi</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. kegunaan Penelitian .....	8
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b>	
A. Konsep Efektivitas .....	9
B. Penggunaan Dana Desa .....	12
C. Pembangunan Desa .....	15
D. Kerangka Pikir .....	17
E. Fokus Penelitian .....	19
F. Dekskripsi Fokus Penelitian .....	20
<b>Bab III Metode Penelitian</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	21
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	21
C. Sumber Data .....	22
D. Informan Penelitian .....	22
E. Teknik Pengumpulan Data .....	23
F. Teknik Analisis Data .....	24
G. Keabsahan Data .....	26

#### **Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	28
B. Perencanaan Program Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana Fisik di Desa langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.....	38
C. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dalam Program Pembangunan Desa di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu .....	51

#### **Bab V Penutup**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>78</b>
-----------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

No	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	23
Tabel 4.1 Kriteria Tingkat Kesejahteraan .....	31
Tabel 4.2 Daftar Usulan Kegiatan Bidang Pembangunan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana di desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu tahun 2018.....	42
Tabel 4.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa). Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Pemerintah Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun 2018 .....	45
Tabel 4.4 Daftar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Langkidi Kecamatan Bajo kabupaten Luwu tahun anggaran 2018.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. (Suci Indah Hanifah 2015 : 4). Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah Desa sering kali identik dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot (Furqaini,Astri:2011). Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannya hak-hak istimewa, antara lain terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa, pemilihan Kepala Desa (kades) serta proses pembangunan desa. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan landasan bagi otonomi Desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif.

Keefektifitasan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dana desa. Bicara tentang efektivitas menjadi suatu hal yang penting dalam melihat hasil suatu program dari kebijakan yang telah disepakati bersama. Efektivitas juga dapat menjadi sebuah pengukur suatu kebijakan benar-benar bermanfaat dalam mengatasi permasalahan yang ada. Khususnya di Indonesia salah satu permasalahan yang sedang dihadapi adalah rendahnya kesejahteraan dan kurangnya pembangunan infrastruktur masyarakat pedesaan. (Susi Eka Prayamita 2017 : 19)

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2018 tidak membatasi Desa untuk berkreasi dalam membuat program. Yang terpenting adalah program yang didanai Dana Desa dibuat sesuai dengan prioritas kebutuhan Desa tersebut dan sumber daya yang dimilikinya. Dalam hal ini Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membuat dan menjalankan sendiri program yang didanai oleh Dana Desa. Dengan ketentuan bahwa program tersebut harus tepat sasaran dan nyata kebutuhan masyarakat desa. Demi tercapainya tujuan penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomer 21 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Khususnya Bidang Pembangunan Desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi dana dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Peraturan Bupati Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa mengenai penggunaan Dana Desa Pasal 13 Ayat (1) sampai (5) serta Pasal 14 (1) sampai (5) tentang pembangunan desa. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007, tentang Penyusunan Dokumen RPJMDes yang merupakan dokumen yang menunjukkan arah tujuan dan kebijakan pembangunan desa, dan Dokumen RPJMDes Desa Langkidi sebagai hasil dari proses penjajakan dan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan metode Mekanisme PNPM-MP sebagai tahapan perencanaan yaitu mulai dari penggalan potensi, masalah dan gagasan Dusun/Desa, hingga kepada penetapan rancangan pembangunan Desa Langkidi tahun anggaran 2016-2021.

Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. (Indrasto Wahyudi Dahlan, 2012 ; 44)

Pada tahun 2017 Dana Desa yang diperoleh Desa Langkidi adalah Rp. 775.629.000,- dikarenakan ada 8 program yang canangkan dan pada tahun 2018 Desa Langkidi mendapatkan Rp..684.580,000- dikarenakan ada 7 program yang akan dilaksanakan desa. Perencanaan penyelenggaraan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 6 Permendagri Nomor 66 Tahun 2007). Rencana Anggaran Biaya di butuhkan dalam rencana pembangunan Desa, dimana dalam pembangunan Desa tersebut terdapat beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh Aparat Departemen, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat.

Pada dasarnya Desa Langkidi memiliki potensi alam yang cukup untuk dikembangkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian hal tersebut belum sepenuhnya tersentuh oleh pengembangan dalam berbagai bidang, sehingga persoalan kemiskinan dan pengangguran di Desa Langkidi menjadi suatu hal yang sangat serius menjadi perhatian pemerintah. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kemandirian untuk

mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungan dan mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut, maka dipandang perlu untuk pembangunan yang dapat mengatasi masalah kemiskinan tersebut, melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelembagaan system pembangunan partisipasif, mengefektifkan fungsi dan peran pemerintah local, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana dasar, peningkatan kualitas dan kuantitas ekonomi masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Rencana dalam rangka pembangunan desa disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan bimbingan Camat yang dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Kecamatan yang selanjutnya diajukan oleh Kepala Desa. Semua rencana atau usulan dari Desa yang telah diterima oleh Camat selanjutnya dibahas secara bersama-sama dengan Instansi yang ada ditingkat Kecamatan melalui diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dengan bimbingan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kepala Kantor Pembangunan Daerah Kabupaten. (Suci Indah Hanifah 2015 : 5).

Pada Tahun 2017 penelitian yang dilakukan oleh Miskawati dengan judul “peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan desa (studi di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu) ”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan desa (studi di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu). Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten

Luwu terhadap anggota Badan Perwakilan Desa tentang peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan desa. Peranan Badan Perwakilan Desa dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.
2. Bagaimana pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa dalam pembangunan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

Selanjutnya pada tahun 2011 tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (studi pada Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Berdasarkan hasil pembahasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan.

Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sareng secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud

partisipasi masyarakat hingga tingkat Desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Desa Sareng dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 yang menjadi acuan dalam perencanaan ADD sudah diterapkan dengan baik.

Dari semua hasil penelitian tentang anggaran desa terdahulu maka saya sebagai peneliti ingin membahas masalah tersebut dengan kriteria atau ukuran efektivitas penggunaan Dana Desa melalui pencapaian tujuan dari program pembangunan infrastruktur di Desa langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, sehingga mendasari peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana proses dan efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”

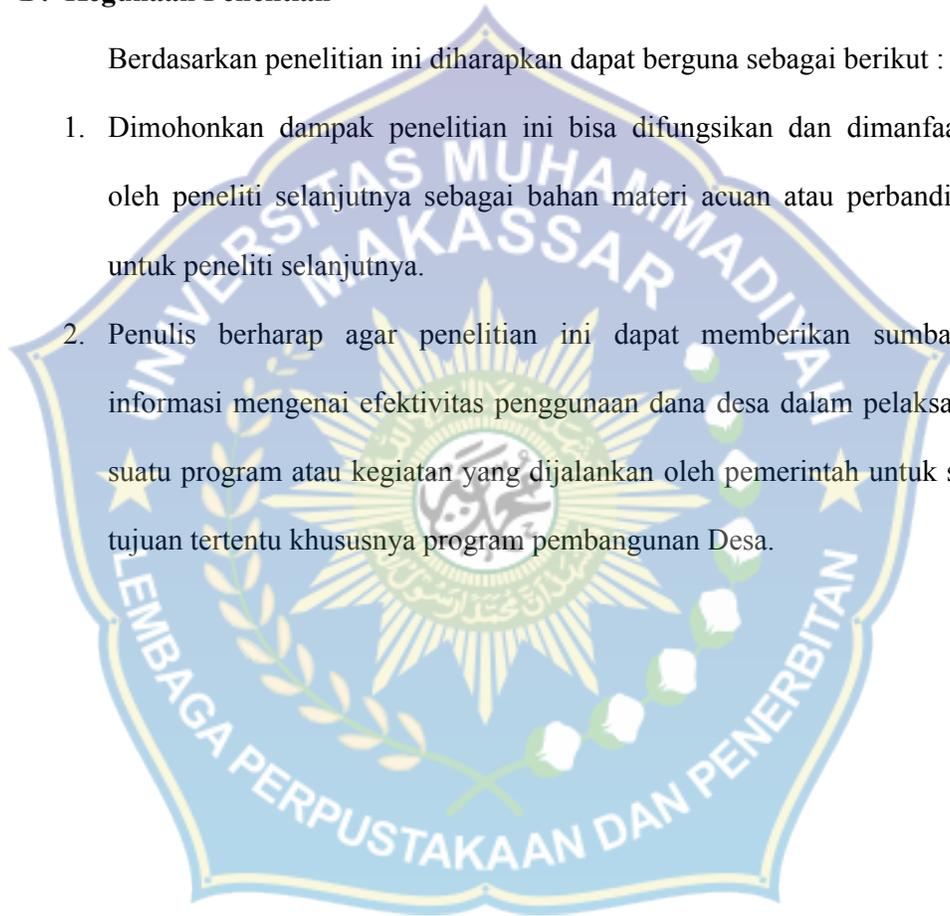
### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Dana Desa melalui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Dimohonkan dampak penelitian ini bisa difungsikan dan dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan materi acuan atau perbandingan untuk peneliti selanjutnya.
2. Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah untuk suatu tujuan tertentu khususnya program pembangunan Desa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Efektivitas**

##### **1. Defenisi Efektivitas**

Pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, makin besar presentase yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya”. Menurut Schemerhon John.R.Jr (1986:35) efektivitas adalah pencapaian target yang diukur dengan membandingkan realisasi sesungguhnya. Efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang efektif memilih pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Potter Drucker efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar dan memusatkan sumber usaha pada pekerjaan. Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input“. Dari pengertian-pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. (Hendra, 2018 : 4).

Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan

yang dijalankannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdurahmat dalam Othenk (2008: 7), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. (Emmelia Nadira Satiti, 2018 : 7).

Seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987) dalam bukunya yang berjudul Teori Organisasi, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas juga dapat menjadi sebuah pengukur suatu kebijakan benar-benar bermanfaat dalam mengatasi permasalahan yang ada. Khususnya di Indonesia salah satu permasalahan yang sedang dihadapi adalah rendahnya kesejahteraan masyarakat pedesaan. (Susi Eka Prayamita, 2017 : 20).

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“ efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut :“ efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran

atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OS) > (OA)$  disebut efektif. ( Emy Hidayati, 2013 : 14).

Menurut Subagyo (2000:87) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Pengertian efektivitas menurut Hadyaningrat (1995:16) adalah sebagai berikut Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Supriyono (2000:29) mendefinisikan pengertian efektivitas sebagai berikut Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan keluaran tanggung jawab dengan sasaran yang harus di capai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka dapat dikatakan efektif dan efisien. Suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. ( Syafruddin, 2017 : 277).

## 2. Ukuran Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian dalam Emmelia Nadira Satiti (2018 : 7), yaitu:

- a. Perencanaan, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- b. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

### **B. Penggunaan Dana Desa**

Peraturan Bupati Luwu Nomer 6 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dikabupaten luwu tahun anggaran 2018 :

1. Penggunaan dana desa
  - a. Pasal 13
    - 1) Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
    - 2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

- 3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, sarana olahraga desa sesuai kewenangan desa.
- 4) Pembangunan sarana olah raga desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- 5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat desa diruang public yang dapat diakses masyarakat desa.

b. Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1), ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain :

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. Lingkungan pemukiman
  - b. Transportasi
  - c. Energy
  - d. Informasi dan komunikasi

- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. Kesehatan Masyarakat
  - b. Pendidikan dan kebudayaan
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
  - a. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan
  - b. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan / atau produk unggulan kawasan pedesaan.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
  - b. Penanganan bencana alam dan
  - c. Pelestarian lingkungan hidup
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa). Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. (Risma hafid, 2016 : 21).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (Moh. Ikbal Babeng, 2018: 180)

### **C. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa adalah suatu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu desa membangun

dan membangun desa yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Desa. (Indrasto Wahyudi Dahlan, 2012 : 47).

Menurut Katz dalam Agus Subroto (2009;34) pembangunan desa adalah proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Sejalan dengan itu tingkat partisipasi masyarakat desa juga merupakan proses yang terencana dari situasi masyarakat desa yang satu ke situasi masyarakat desa yang lain yang dinilai lebih tinggi atau lebih baik. dengan kata lain pembangunan masyarakat desa adalah perubahan masyarakat desa ke arah yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditempuh melalui penerapan prinsip partisipatif.

Menurut Djiwadono dalam Risma Hafid (2016 : 18) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualiti hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Moeljarto Tjokrowinoto dalam Risma Hafid (2016 : 18) pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya,

menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan desa terus ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, karena pembangunan desa merupakan hal yang sangat vital dan strategis, karena desa merupakan mutu basis kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa pada dasarnya merupakan suatu pembangunan sosial yang menyangkut berbagai aspek hidup dan kehidupan masyarakat, melalui pembangunan desa diusahakan agar masyarakat desa bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka mewujudkan stabilitas dan pembinaan wilayah. (Miskawati, 2016 : 41).

Dengan demikian pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan bantuan pemerintah, maka pembangunan yang dimaksud adalah dilaksanakannya oleh masyarakat dan pemerintah secara berimbang, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pembinaan serta bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk prakarsa dan swadaya gotong-royong.

#### **D. Kerangka pikir**

Konsep teori melambangkan kerangka pemikiran atau bagian-bagian gagasan, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*) yang bagi si

pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.

Berdasarkan masalah yang diteliti yakni efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program Pembangunan infrastruktur di Desa langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, maka yang menjadi fokus penelitian adalah mencari sumber data melalui observasi dan wawancara secara langsung pada instansi pemerintah/ perangkat daerah serta instansi terkait.

Peneliti mengambil 2 indikator yang dikemukakan oleh S.P Siagian dalam Emmelia Nadira Satiti (2018 : 7) untuk mengetahui sumber permasalahan dari keefektivitas dalam penggunaan dana desa sehingga bisa dijadikan bahan acuan untuk menyelesaikan masalah keefektivitasan tersebut, adapun dua indikator yaitu : Perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Setelah indikator dan penyebab terwujudnya efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program Pembangunan infrastruktur di Desa langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu ini telah diketahui tahap selanjutnya adalah bagaimana peran instansi untuk mengefektivitaskan penggunaan dana desa dalam pembangunan didesa langkidi.

### Bagan Kerangka Pikir



#### E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya penggunaan dana desa :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

## F. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa langkidi kecamatan bajo kabupaten luwu menggunakan 2 indikator dalam mencapai kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak :

1. Perencanaan, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
2. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini selama 2 bulan dari tanggal 22 Oktober 2018 s/d 22 Desember 2018 dan tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi penelitian di seluruh wilayah desa Langkidi karena mengingat masalah yang diteliti yaitu mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan infrastruktur desa yang dikelola oleh perangkat desa dan dilaksanakan dalam lingkup desa itu sendiri.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah satu cara penelitian yang menjadikan deskripsi dari orang-orang atau sifat dalam desain kalimat baik lisan maupun tulisan. Salah satu kekhasan penelitian kualitatif ialah berkarakter deskriptif dimana data digabungkan dalam format kalimat, gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini pula biasa dikatakan sebagai metode penelitian naturalistik, penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*naturalsetting*). (Sugiyono : 2013). Data data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini yaitu studi kasus. merupakan suatu metode untuk mempelajari suatu kejadian atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Dengan peneliti ikut berpartisipasi dalam lingkungan penelitian.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder diantaranya adalah:

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung terhadap respon dan atau pihak-pihak yang terkait ataupun melalui kuisioner yang diberikan yaitu beberapa daftar pertanyaan yang berkaitan efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di desa langkidi kecamatan bajo kabupaten luwu

#### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, internet, atau jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek yang di teliti sehingga penelitian lebih akurat.

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data dalam melakukan penelitian, maka diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan

penelitian di lakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan karakteristik informan yang *knowrealijible*, dan siap memberikan informasi secara terbuka. Berikut gambaran informan yang akan dilakukan wawancara oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Karakteristik Profil Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Muslim S.PI	MS	Kepala Desa Langkidi	1
2	Kartu	KN	Ketua BPD Desa Langkidi	1
3	Yana Putri	YP	Operator Desa Langkidi	1
4	Yusnawi Taslim	YT	Kepala Dusun T. Tangga	1
5	Ruslan	RS	Kasih Kesejahteraan	1
6	Sofyan Samal	SS	Kepala Dusun Bulu-Bulu	1
7	Rosmini	RM	Masyarakat Desa Langkidi	1
8	Mutmaima	MM	Masyarakat Desa Langkidi	1
		Jumlah		8

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatur yang ada dengan apa yang betul-betul terjadi/berlangsung dilapangan. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian di Desa Langkidi Kecamatan Bajo

Kabupaten Luwu, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun bidang yang saya pelajari dan ingin saya perdalam lebih jauh dalam observasi lapangan sesuai dengan judul efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program Pembangunan infrastruktur di Desa langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

## 2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data dari informan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan merujuk pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar data yang ingin diperoleh lebih lengkap dan valid. Pencarian data di desa langkidi kecamatan bajo kabupaten luwu, melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program Pembangunan infrastruktur di Desa langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono : 2013).

Menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara

interaktif. Pertama, reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan dokumen, arsip, dan sebagainya, sedangkan proses mempertegas, memperpendek, membuang yang tidak perlu, menentukan fokus, dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat. Kedua, penyajian data, seperti merakit data dan menyajikan dengan baik supaya lebih mudah dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, table dan seterusnya. Ketiga menarik kesimpulan/verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal belum masih kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah pengumpulan data berakhir (Sugiyono : 2010).

#### **G. Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadipada obyek penelitian.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut (Sugiyono : 2013) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

##### **1. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin baik dan kehadiran peneliti tidak lagi dianggap sebagai orang asing yang mengganggu perilaku masyarakat yang sedang dipelajari.

## 2. Meningkatkan ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis, karena peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

## 3. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi yaitu pertama, triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Ketiga, triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada pagi hari, siang hari dan sore hari biasanya akan berbeda.

## 4. Analisis Kasus Negative

Kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Disini peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan ditemukan, maka data tersebut sudah dapat dipercaya.

## 5. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman

wawancara. Data tentang interaksi manusia atau suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

#### 6. Mengadakan *Membercheck*

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut dapat dikatakan valid, sehingga semakin kredibel data tersebut dan begitupun sebaliknya.

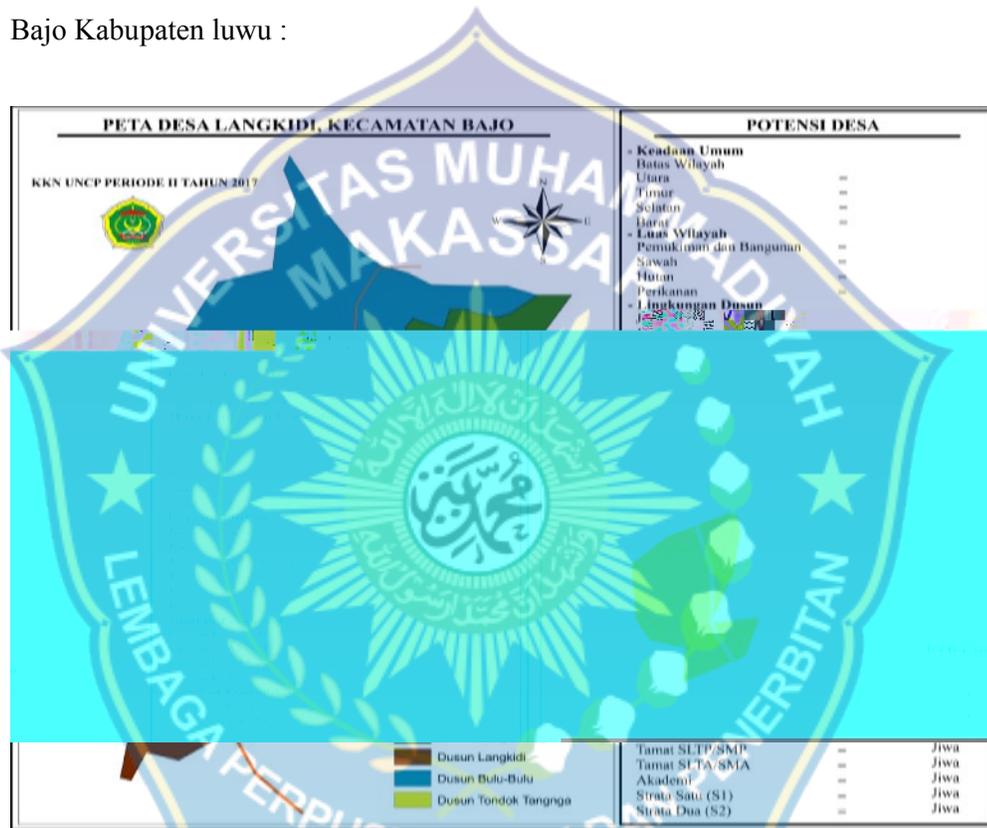


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

Berikut gambaran peta administrasi yang ada di Desa Langkidi, Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu :



Sumber : Kantor Desa Langkidi 2018

#### 1. Deskripsi Sejarah Desa

Desa Langkidi terbentuk sebagai salah satu wilayah pemerintahan yang ada di Kabupaten Luwu, dibawah pimpinan Kepala Desa Muslim,S.Pi untuk periode 2016 s/d 2021, terpilih sebagai Kepala Desa secara demokratis dengan pemilihan langsung dari masyarakat Desa Langkidi.

## 2. Geografi

### a. Letak Desa

Desa Langkidi adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bajo yang berada di bagian Utara Ibukota Kabupaten Luwu. Jarak tempuh wilayah Desa Langkidi dari ibukota Kabupaten Luwu  $\pm$  15 KM. desa ini memiliki luas wilayah 2,75km.

Desa Langkidi Mempunyai luas wilayah 2 Km terletak di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, dengan batas wilayah adalah ;

- Sebelah Barat : Desa Saga Kec. Bajo
- Sebelah Utara : Desa Pangi Kec. Bajo
- Sebelah Timur : Desa Tabbaja Kec Kamanre
- Sebelah Selatan: Desa Jambu Kec. Bajo

Secara administrative Desa Langkidi Terbagi atas 4 dusun yaitu : Dusun Tondok Tangnga, Dusun Langkidi, Dusun P. Bulawang dan Dusun Bulu-bulu. Setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun di bantu oleh Ketua RW dan Ketua RT.

Sistem pemerintahan yakni, camat sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan kecamatan. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab pada masyarakat desa, dan prosedur pertanggungjawaban dilaporkan ke bupati melalui Camat. Kemudian dari pada itu, kepala desa bersana dengan BPD wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakatnya setiap tahunnya.

#### b. Topografi Desa

Desa Langkidi memiliki kondisi daerah yang dataran, berada diatas permukaan laut. Kondisi tanah yang subur dan produktif untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.

#### c. Iklim dan Curah Hujan

Iklim dan curah ujan di Desa Langkidi hampir sama dengan daerah lainnya yang ada di Kabupaten Luwu yakni terdapat 2 musim (musim hujan dan musim kemarau). Musim hujan biasanya mulai pada bulan November hingga bulan Juli. Sedangkan musim kemarau biasanya terjadi antara bulan Agustus hingga Oktober, namun diantara musim kemarau tersebut masih sering terjadi hujan meskipun hanya sesekali.

#### d. Hidrologi dan Tata Air

Di Desa Langkidi sumber air masyarakat adalah hanya dari air sumur tanah/bor, air sumur/mesin air, dan sungai. Air tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi kebutuhan air bersih rumah tangga. Untuk kebutuhan pertanian sawah, perkebunan coklat dan tanaman lainnya menggunakan air tadah hujan, dan air saluran irigasi.

### 3. Keadaan Sosial

Jumlah Penduduk Desa Langkidi 1.282 jiwa, dimana laki-laki 602 jiwa dan perempuan 680 jiwa. Berdasarkan hasil panggilan gagasan desa/pengkajian keadaan Desa Langkidi yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) pada program PPNPM-MP TA 2017, terkait dengan tempat tinggal

penduduk, pendapatan perbulan/pertahun, kepemilikan lahan, pekerjaan serta tingkat pendidikan masyarakat, sebagai berikut :

Table 4.1

## Kriteria Tingkat Kesejahteraan

NO	KRITERIA/URAIAN	K	S	M	SM
1	Keadaan Tempat Tinggal				
	1) Berlantai Tanah				✓
	2) Berlantai Papan			✓	✓
	3) Berlantai Semen		✓	✓	
	4) Berlantai Keramik	✓	✓		
	5) Berdinding Daun Sagu				✓
	6) Berdinding Papan			✓	
	7) Berdinding Temok	✓	✓	✓	
	8) Beratap Rumbia/Daun Sagu				✓
	9) Beratap Seng	✓	✓		
	10) Beratap Seng	✓	✓		
2	Pekerjaan				
	1) Pegawai Negeri Sipil	✓			
	2) Pelaut	✓			
	3) Pengusaha	✓			
	4) Usaha Mikro		✓		
	5) Jualan Campuran/Warung Campuran		✓	✓	
	6) Petani			✓	
	7) Buruh Tani			✓	✓
	8) Buruh Bangunan				✓
	9) Tidak Tetap				✓
3	Pendapatan				
	1) Rp. 5.000.000,- ke atas	✓			
	2) Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5000.000,-		✓		
	3) Rp. 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,-			✓	
	4) Kurang dari Rp. 1.000.000,-			✓	✓
	5) Tidak tetap				✓
4	Pendidikan				
	1) Sarjana	✓			
	2) Tamat SMA Sederajat		✓		
	3) Taman SMP Sederajat			✓	
	4) Tamat SD Sederajat			✓	✓
	5) Tidak Sekolah				✓

Sumber : Kantor Desa Langkidi, 2017

Keterangan :

K = Kaya

S = Sedang

M = Miskin

SM = Sangat Miskin

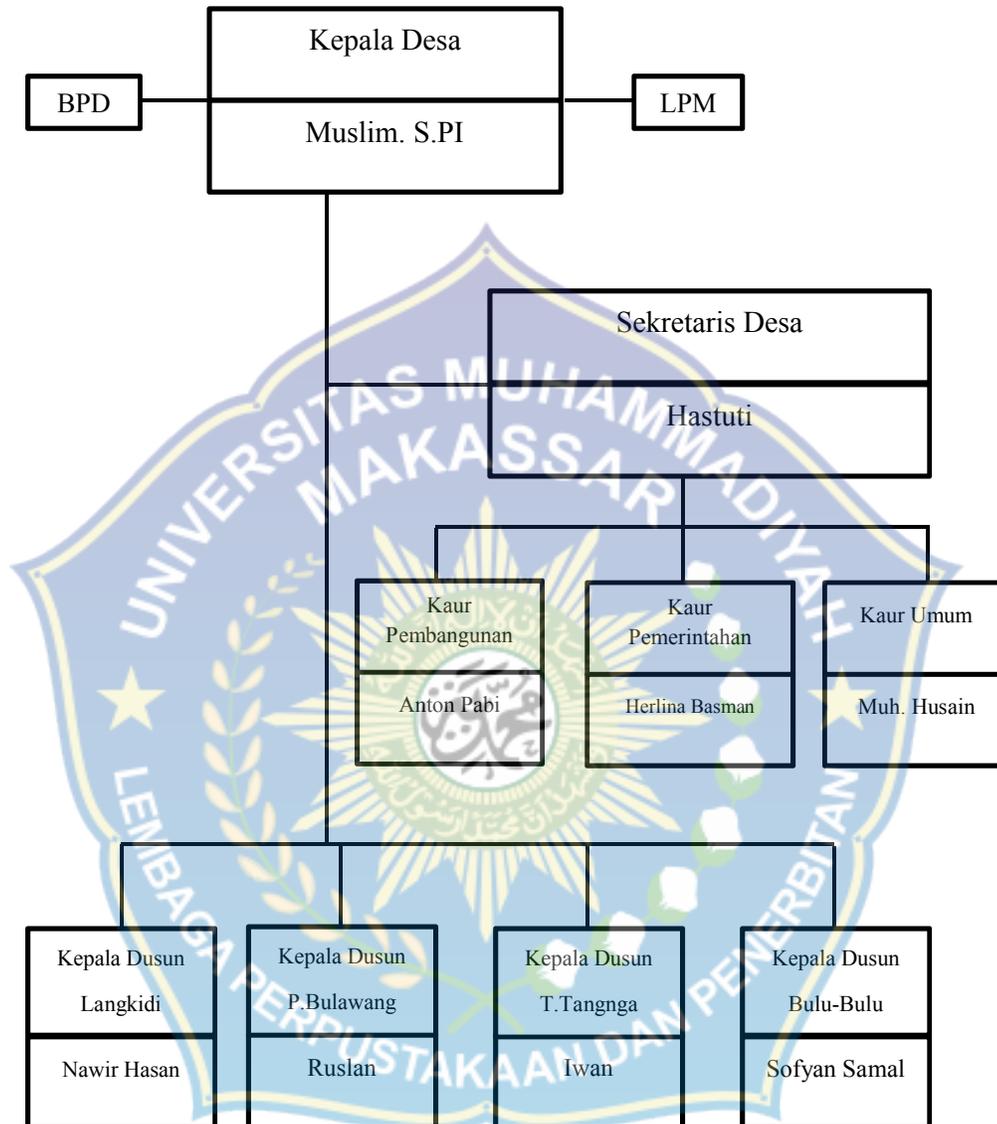
Pada tabel 4.1 kriteria tingkat kesejahteraan didesa langkidi hanya 3% yang kaya, sedang hanya 8%, miskin 52% dan sangat miskin 37%. Berarti tingkat kesejahteraan didesa langkidi masih minim dikarenakan masih besarnya tingkat miskin dan sangat miskin yang ada didesa langkidi.

4. Keadaan Ekonomi

Persentase sumber mata pencaharian sebagai pekerjaan pokok masyarakat Desa Langkidi adalah sebagai petani coklat dan petani sawah 34%, buruh tani kebun 45%, sopir angkot dan tukang ojek 17% dan PNS 4%.

Masyarakat Desa Langkidi tidak memiliki jenis pekerjaan sampingan yang tetap, rata-rata jenis pekerjaan pokok yang telah digeluti menjadi pekerjaan utama yang mendukung pendapatan keluarga di setiap rumah tangga.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Langkidi tahun 2016 s/d 2021



*Sumber : Kantor Desa Langkidi, 2018*

Pada struktur organisasi Pemerintah Desa Langkidi diatas, yang paling atas bagian tengah ada bapak Muslim S,PI selaku Kepala Desa Langkidi atau pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Disebelah kiri yang sejajar dengan kepala desa ada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan disebelah kanan ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Selanjutnya ada sekretaris desa yang berfungsi untuk meliputi, menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu persiapan penyusunan peraturan desa dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Dibawah sekretaris desa ada kaur pembangunan yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat, kaur pemerintahan yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa dan ada juga kaur umum yang bertugas untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan.

Yang paling bawah dalam struktur pemerintahan desa diatas adalah kadus atau biasa disebut kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RW dan RT dan distruktur pemerintahan desa diatas ada 4 dusun yaitu dusun langkidi yang dipimpin oleh Nawir Hasan, dusun P. Bulawang

yang dipimpin oleh Ruslan, Dusun T. Tangnga yang dipimpin oleh Iwan dan dusun Bulu-Bulu yang dipimpin Sofyan Samal.

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengurus BPD merupakan hasil pemilihan secara demokrasi yang dilaksanakan di kantor Desa Langkidi untuk masa jabatan 5 tahun. BPD selaku badan permusyawaratan Desa bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan bersama-sama kepala desa membuat dan menetapkan berbagai peraturan desa.

Pengurus BPD yang ada di Desa Langkidi Untuk Periode 2016 -2021 terdiri dari

Ketua	: Kantu
Wakil ketua	: Hj. Syamsiah S, A.Ma
Sekretaris	: Tasmin
Anggota	: 1. Hasanuddin 2. Maryana

Sejauh ini kualitas SDM pengurus BPD di Desa Langkidi masih rendah, selain itu pengurus belum mengetahui secara pasti tugas dan fungsinya sehingga kinerja BPD belum berjalan secara maksimal. Masyarakat berharap agar pihak melakukan berbagai upaya pengembangan kapasitas bagi pengurus BPD.

b. Lembaga Pemerdayaan Masyarakat (LPM)

Pengurus LPM adalah hasil pemilihan secara demokrasi yang dilaksanakan di kantor Desa Langkidi, dengan masa jabatan selama 5 tahun. LPM

selaku lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam menjamin pelibatan dan pemberdayaan masyarakat berbagai kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengurus LPM yang ada di Desa Langkidi Untuk Periode 2016-2021 terdiri :

Ketua : Gulung

Sekretaris : Abd. Rahman

Bendahara : Rahmawati

Selain itu dalam kepengurusan LPM juga terdapat berbagai seksi pembangunan yang di koordinir oleh ketua seksi dan bertanggung jawab sesuai dengan seksi masing-masing.

Sejauh ini kualitas SDM pengurus LPM di Desa Langkidi masih rendah, selain itu pengurus belum memahami secara pasti tugas dan fungsinya, sehingga kinerja LPM belum berjalan secara maksimal. Masyarakat berharap agar pihak terkait melakukan berbagai upaya pengembangan kapasitas bagi pengurus LPM.

#### c. Kelompok Tani dan Gapoktan

Terdapat 4 kelompok tani di Desa Langkidi dengan aktifitas pertanian yakni sekitar 95% jangka panjang (coklat, kelapa) dan sekitar 5% adalah tanaman jangka pendek (jagung dan berbagai jenis hortikultura). Pada tahun 2009 kelompok tani tersebut kemudian mengorganisir diri kedalam prganisasi GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang kemudian di beri nama “Langkidi” dengan struktur terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara.

#### d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pengurus PKK di tingkat Desa Langkidi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan di bantu oleh beberapa kelompok kerja (POKJA) di tingkat Dusun dan di tingkat Rukun Tetangga (TR)

Pengurus PKK yang ada di Desa Langkidi untuk periode 2016-2017 terdiri dari :

Ketua : Irawati  
 Sekretaris : Darnawati Habas  
 Bendahara : Rahmawati  
 Ketua Pokja I : Hj. Habaedah  
 Ketua Pokja II : Mardiana  
 Ketua Pokja III : Romlah  
 Ketua Pokja IV : Suharni

e. Kader Posyandu

Kader posyandu memiliki peran dan fungsi dimasyarakat sebagai tenaga sukarela yang membantu Badan Desa dalam melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat, seperti imunisasi dan penimbangan pada balita, pelayanan KB serta berbagai pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan masyarakat. Kader posyandu juga masih memiliki keterbatasan kapasitas dan sumberdaya sehingga masih sangat diperlukan pembinaan.

f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Langkidi akan di bentuk pada tahun 2011. Pengurus BUMDES terdiri dari, Direktur, Sekretris, Bendahara, serta dibantu oleh Kepala Unit Usaha.

Jumlah kepala unit usaha sesuai dengan kebutuhan. Saat ini BUMDES masih berada pada tahap pendampingan dimana prosesnya terhadap penguatan kelompok dan pembuatan AD/ART maupun membenahan secretariat dan perlengkapan lainnya. BUMDES dibentuk bertujuan sebagai lembaga ekonomi induk di desa.

### **B. Perencanaan Program Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana Fisik di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu**

Perencanaan pembangunan dalam mencapai efektifitas penggunaan Dana Desa di Desa Langkidi sudah cukup memadai dan hal ini diperkuat dengan berbagai hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Langkidi mengenai proses perencanaan dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan :

“Dalam mengawali perencanaan pembangunan dimulai dengan musyawarah dusun (musdus) setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah tingkat Desa atau biasa disebut musrembangdes dan dihadiri masing-masing perwakilan setiap Dusun yang ada di Desa Langkidi, adapun musyawarah tersebut membahas tentang program-pogram apa saja yang akan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku” (Hasil wawancara MS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat mengetahui bahwa perencanaan pembangunan di Desa Langkidi sudah sesuai dengan prosedur karena dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan Pemerintah Desa sudah melibatkan masyarakat sebagaimana penjelasan dari Kepala Desa diatas,

Ketua BPD Desa Langkidi pun menyatakan hal demikian mengenai proses perencanaan dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan :

“Perencanaan program pembangunan yang kami lakukan dari hasil musrenbang dengan pemerintah desa dan masyarakat membahas program pembangunan apa saja yang dibutuhkan masyarakat di Desa Langkidi, seperti pembangunan rabat beton, drainase, talud dan sebagainya” (Hasil wawancara KN, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan desa sudah dilakukan sesuai apa yang sudah dirapatkan dimusrenbang dan pembangunan di Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Sedangkan menurut Operator Desa Langkidi mengenai proses perencanaan dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan:

“Saya rasa perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai kebutuhan warga desa karena program pembangunan desa dari hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan warga melalui musyawarah Dusun terlebih dahulu untuk memutuskan program apa saja yang akan diusulkan dalam musyawarah berikutnya yaitu musyawarah tingkat Desa atau biasa disebut musrembangdes” (Hasil wawancara YP, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan hampir sama dengan pendapat dari narasumber yang lain karena semua program pembangunan di Desa pasti untuk desa dan masyarakat di Desa.

Seperti yang dikatakan selanjutnya oleh Kadus T. Tangnga mengenai proses perencanaan dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan :

“Menurut saya selaku kadus T. Tangnga dalam hal perencanaan program pembangunan desa biasa kami awali dengan musyawarah dusun (musdus)

untuk mencapai kesepakatan mengenai program apa saja yang akan diusulkan dimusrembangdes bersama Kades, Ketua BPD, para jajarannya yang ada di Desa” (Hasil (Hasil wawancara YT, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan melibatkan orang-orang dari pemerintah desa dan warga yang sudah disepakati bersama dalam rapat musrembang.

Pendapat dari Kasih Kesejahteraan di Kantor Desa Langkidi mengenai proses perencanaan dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan :

“Perencanaan program pembangunan yang disepakati dari hasil musrembang bersama dengan perwakilan masing-masing Dusun dan Kepala Desa beserta jajarannya guna mencapai hasil yang maksimal, meskipun dalam pelaksanaan pembangunannya masih bertahap” (Hasil wawancara RS, 25 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di Desa Langkidi dari hasil yang sudah disepakati bersama karena lancarnya sebuah program di Desa karena adanya kerja sama yang baik di Desa.

Sama halnya dengan pendapat dari Kadus Bulu-Bulu mengenai perencanaan untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan :

“Perencanaan yang dilakukan sudah benar-benar matang karena hasil kesepakatan bersama masyarakat, itu berawal dari musyawarah Dusun terlebih dahulu sebelum diajukan dalam musyawarah Desa” (Hasil wawancara SS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah dilakukan dengan matang

untuk memudahkan segala program pembangunan dan kondisi di Desa Langkidi memang masih dalam proses pembangunan infrastruktur.

Sedangkan menurut masyarakat Desa Langkidi mengenai perencanaan yang matang dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan:

“Terkait perencanaan pembangunan, Kepala Desa dan para jajarannya sudah merencanakan dengan baik karena masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, hal ini dapat dilihat dengan diadakannya musyawarah dimasing-masing dusun sebelum musrembang dilaksanakan” (Hasil wawancara RM, 26 Oktober 2018).

Sama halnya dengan pendapat dari masyarakat Desa Langkidi mengenai perencanaan untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan:

“Sebelum pembangunan dimulai kami selaku masyarakat Desa selalu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan lewat rapat dikantor Desa”, (Hasil wawancara MM, 26 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pembangunan infrastruktur desa sudah dilakukan dengan matang oleh pemerintah desa untuk memudahkan segala program pembangunan, untuk menyejahterahkan masyarakat desa dan kondisi di Desa Langkidi memang masih dalam proses pembangunan infrastruktur.

Peraturan Bupati Luwu Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa mengenai penggunaan dana desa pasal 13 ayat 1 sampai 5 serta pasal 14 ayat 1 sampai 5 tentang pembangunan desa.

Berikut tabel daftar usulan kegiatan bidang Pembangunan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu tahun 2018.

Tabel 4.2

Kegiatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Atau Sarana Dan Prasarana Di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume Perkiraan	Biaya Perkiraan
1	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	Dusun Pangkaroang Bulawang	92 meter	Rp. 104.000.000,-
2	Pembangunan Talud	Dusun Bulu-Bulu	478 meter	Rp. 100.000.000,-
3	Pembangunan Drainase	Dusun Langkidi	450 meter	Rp. 200.000.000,-
4	Pembangunan Irigasi	Dusun Bulu-Bulu	138 meter	Rp. 90.000.000,-
5	Pembangunan Dampari	Dusun langkidi	1 Unit	Rp. 90.000.000,-
6	Penyertaan Modal Ke BUMDes	BUMDesa Langkidi	-	Rp. 50.000.000,-
7	Pelatihan Masyarakat (Pembhrelayaan masyarakat)	Desa Langkidi	-	Rp. 40.580.000,-
JUMLAH				<b>Rp. 684.580.000,-</b>

Sumber : Kantor Desa Langkidi, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 7 daftar usulan kegiatan bidang pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu tahun 2018 yang terbagi atas beberapa dusun di Desa Langkidi terdapat sarana dan prasarana. Pada tabel diatas yang pertama ada

pembangunan rabat beton yang diusulkan karena pada musim hujan jalan dusun, jalan desa, jalan tani sangat sulit dilalui karena becek dan licin (sebagian besar masih jalan tanah) dan volume dari jalan di dusun 1,5 km, jalan desa 1,5 km dan jalan tani 3 km tapi yang akan dibangun ada 92 meter di Dusun P. Bulawang dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 104.000.000,-. Selanjutnya pembangunan talud dan pembangunan drainase yang diusulkan karena sering terjadi banjir, erosi di musim hujan, sehingga mengikis lahan kebun masyarakat dan pada musim hujan terjadi genangan air/banjir dijalanan yang mengganggu aktivitas masyarakat terkhusus kepada kelompok masyarakat tani. Volume dari talud dan drainase yang ada di Desa Langkidi 1,5 km dan untuk pembangunan talud volumenya 478 meter di Dusun Bulu-Bulu dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- dan drainase 450 meter di Dusun Langkidi dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000.

Selanjutnya pada pembangunan irigasi dan damparit yang diperlukan untuk menghindari terkikisnya jalan/bahu jalan pada musim hujan karena saluran air tidak berfungsi maksimal masih berupa parit sehingga air hanya meresap dan melimpah kejalanan, pada musim hujan terjadi genangan air/banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat terkhusus kepada kelompok masyarakat tani, volume dari irigasi di Desa Langkidi 2 km, yang akan dibangun ada 138 meter di Dusun Bulu-Bulu dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 90.000.000,- dan untuk pembangunan damparit ada 1 unit di Dusun Langkidi dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 90.000.000,-.

Penyertaan modal ke BUMDes dan pelatihan masyarakat (pemberdayaan masyarakat) diusulkan karena kurangnya modal untuk pengembangan usaha ekonomi yang produktif, belum berkembangnya SDM kaum perempuan mengenai keterampilan khusus untuk usaha ekonomi keluarga dan tingkat pengangguran masyarakat desa semakin tinggi, terkait dengan pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dan buruh tani yang hanya mendapat upah dari kepemilikan lahan masyarakat desa Langkidi. Biaya perkiraan untuk penyertaan modal ke BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- dan untuk pelatihan masyarakat (pemberdayaan masyarakat) sebesar Rp. 40.580.000,-. Dari daftar usulan kegiatan bidang Pembangunan Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana di Desa Langkidi jumlah dana yang ditetapkan sebesar Rp. 684.580.000,-.

Dari daftar usulan tersebut kemudian dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa). Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Pemerintah Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu tahun 2018.

Lampiran Peraturan Desa  
 Nomor : 3  
 Tahun : 2018

Tabel 4.3  
**BELANJA DESA**  
**PEREMBAHAN DESA LANGKIDDI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.005.884.700,00</b>	
1.2.1.	Dana Desa	684.580.000,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	11.214.700,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	310.090.000,00	
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>5.250.000,00</b>	
1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	5.250.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.011.134.700,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	<b>302.504.700,00</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>195.870.000,00</b>	
<b>2.1.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>195.870.000,00</b>	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	131.220.000,00	
2.1.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.250.000,00	
2.1.1.1.3.	Tunjangan Anggota BPD	35.400.000,00	
<b>2.1.2</b>	<b>Kegiatan Operasional Pemerintah Desa</b>	<b>35.891.800,00</b>	
<b>2.1.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>32.991.800,00</b>	
2.1.2.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.371.800,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Benda Pos	500.000,00	
2.1.2.2.9.	Belanja Listrik	600.000,00	
2.1.2.2.10.	Belanja Surat Kabar/ Majalah	1.400.000,00	
2.1.2.2.12.	Belanja STNK	120.000,00	
2.1.2.2.14.	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	1.200.000,00	
2.1.2.2.15.	Belanja Jasa Staf Pemerintah Desa/ Operator Komputer	12.000.000,00	
2.1.2.2.21.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	800.000,00	
2.1.2.2.30.	Belanja Cetak dan Jilid	450.000,00	
2.1.2.2.31.	Belanja Penggandaan	700.000,00	
2.1.2.2.46.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
2.1.2.2.55.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
<b>2.1.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.900.000,00</b>	
2.1.2.3.6.	Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan	2.900.000,00	
2.1.2.3.8.	Belanja Modal Printer	0,00	
2.1.2.3.22.	Belanja Modal Alat Pendingin Ruangan	0,00	
2.1.2.3.28.	Belanja Modal Lemari Pendingin	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
2.1.3	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>	<b>10.300.000,00</b>	
2.1.3.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.200.000,00</b>	
2.1.3.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
2.1.3.2.30.	Belanja Cetak dan Jilid	300.000,00	
2.1.3.2.31.	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.1.3.2.46.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.1.3.2.51.	Belanja Pakaian Khusus/ Tradisional	1.000.000,00	
2.1.3.2.55.	Belanja Perjalanan Dinas	650.000,00	
2.1.3.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>7.100.000,00</b>	
2.1.3.3.6.	Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan	1.000.000,00	
2.1.3.3.10.	Belanja Modal Meja	900.000,00	
2.1.3.3.11.	Belanja Modal Kursi	3.500.000,00	
2.1.3.3.14.	Belanja Modal Filing Cabinet	1.700.000,00	
2.1.5	<b>Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>31.800.000,00</b>	
2.1.5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>31.800.000,00</b>	
2.1.5.2.59.	Belanja Honorarium Tim	31.800.000,00	
2.1.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan</b>	<b>9.178.200,00</b>	
2.1.6.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.178.200,00</b>	
2.1.6.2.16.	Belanja Honorarium Tim	9.178.200,00	
2.1.10	<b>Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Perangkat Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.1.10.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.1.10.2.67.	Belanja Operasional	3.000.000,00	
2.1.11	<b>Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>16.464.700,00</b>	
2.1.11.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>16.464.700,00</b>	
2.1.11.3.30.	Lain-Lain Belanja Modal Sarana dan Prasarana Perkantoran	16.464.700,00	
2.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>594.000.000,00</b>	
2.2.2	<b>Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Jalan Desa</b>	<b>104.000.000,00</b>	
2.2.2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>33.212.000,00</b>	
2.2.2.2.6.	Lain-Lain Belanja Bahan	936.000,00	
2.2.2.2.40.	Lain-Lain Belanja Sewa Alat Berat	9.623.500,00	
2.2.2.2.57.	Belanja Upah Pekerja	18.388.500,00	
2.2.2.2.58.	Lain-Lain Belanja Upah Kerja	1.560.000,00	
2.2.2.2.59.	Belanja Honorarium Tim	2.704.000,00	
2.2.2.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>70.788.000,00</b>	
2.2.2.3.31.	Belanja Modal Jalan	70.788.000,00	
2.2.8	<b>Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Drainase</b>	<b>200.000.000,00</b>	
2.2.8.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>105.174.000,00</b>	
2.2.8.2.6.	Lain-Lain Belanja Bahan	1.800.000,00	
2.2.8.2.57.	Belanja Upah Pekerja	95.174.000,00	
2.2.8.2.58.	Lain-Lain Belanja Upah Kerja	3.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2.2.8.2.59.	Belanja Honorarium Tim	5.200.000,00	
<b>2.2.8.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>94.826.000,00</b>	
2.2.8.3.34.	Belanja Modal Drainase	94.826.000,00	
<b>2.2.11</b>	<b>Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penahan Tana</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>2.2.11.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>44.721.000,00</b>	
2.2.11.2.6.	Lain-Lain Belanja Bahan	900.000,00	
2.2.11.2.57	Belanja Upah Pekerja	39.721.000,00	
2.2.11.2.58	Lain-Lain Belanja Upah Kerja	1.500.000,00	
2.2.11.2.59	Belanja Honorarium Tim	2.600.000,00	
<b>2.2.11.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>55.279.000,00</b>	
2.2.11.3.36	Belanja Modal Talud/ Bronjong	55.279.000,00	
<b>2.2.14</b>	<b>Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Irigasi Tersier</b>	<b>90.000.000,00</b>	
<b>2.2.14.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>51.006.000,00</b>	
2.2.14.2.6.	Lain-Lain Belanja Bahan	810.000,00	
2.2.14.2.57	Belanja Upah Pekerja	46.506.000,00	
2.2.14.2.58	Lain-Lain Belanja Upah Kerja	1.350.000,00	
2.2.14.2.59	Belanja Honorarium Tim	2.340.000,00	
<b>2.2.14.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>38.994.000,00</b>	
2.2.14.3.39	Belanja Modal Irigasi Desa	38.994.000,00	
<b>2.2.59</b>	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Lainnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>2.2.59.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>37.614.000,00</b>	
2.2.59.2.6.	Lain-Lain Belanja Bahan	900.000,00	
2.2.59.2.57	Belanja Upah Pekerja	32.614.000,00	
2.2.59.2.58	Lain-Lain Belanja Upah Kerja	1.500.000,00	
2.2.59.2.59	Belanja Honorarium Tim	2.600.000,00	
<b>2.2.59.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>62.386.000,00</b>	
2.2.59.3.38	Belanja Modal Dam/ Bendungan	62.386.000,00	
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>11.400.000,00</b>	
<b>2.3.2</b>	<b>Pembinaan Satgas Linmas dan Desa</b>	<b>3.600.000,00</b>	
<b>2.3.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.3.2.2.66.	Belanja Insentif	3.600.000,00	
<b>2.3.5</b>	<b>Pembinaan Keagamaan</b>	<b>6.800.000,00</b>	
<b>2.3.5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.800.000,00</b>	
2.3.5.2.66.	Belanja Insentif	4.800.000,00	
2.3.5.2.67.	Belanja Operasional	2.000.000,00	
<b>2.3.6</b>	<b>Kegiatan Gotong Royong Masyarakat</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>2.3.6.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.3.6.2.48.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.000.000,00	
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>53.230.000,00</b>	
<b>2.4.4</b>	<b>Pengelolaan Balai Pengobatan Desa</b>	<b>4.400.000,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>2.4.4.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.400.000,00</b>	
2.4.4.2.28.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	2.000.000,00	
2.4.4.2.66.	Belanja Insentif	2.400.000,00	
<b>2.4.5</b>	<b>Fasilitasi Keluarga Berencana</b>	<b>1.200.000,00</b>	
<b>2.4.5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.200.000,00</b>	
2.4.5.2.66.	Belanja Insentif	1.200.000,00	
<b>2.4.6</b>	<b>Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu</b>	<b>15.600.000,00</b>	
<b>2.4.6.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.600.000,00</b>	
2.4.6.2.48.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.600.000,00	
2.4.6.2.66.	Belanja Insentif	12.000.000,00	
<b>2.4.14</b>	<b>Pemberdayaan Bidang Olahraga</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>2.4.14.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>4.500.000,00</b>	
2.4.14.3.6.	Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan	4.500.000,00	
<b>2.4.27</b>	<b>Pelatihan Pengurus BUMDesa dan BUMDesa Bersama</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>2.4.27.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.4.27.2.70.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	
<b>2.4.35</b>	<b>Penyusunan Profil Desa/Data Desa</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>2.4.35.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>500.000,00</b>	
2.4.35.2.17.	Lain-Lain Jasa Kantor	500.000,00	
<b>2.4.38</b>	<b>Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>9.000.000,00</b>	
<b>2.4.38.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.000.000,00</b>	
2.4.38.2.67.	Belanja Operasional	9.000.000,00	
<b>2.4.40</b>	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa</b>	<b>980.000,00</b>	
<b>2.4.40.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>980.000,00</b>	
2.4.40.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
2.4.40.2.60.	Belanja Honorarium Kegiatan	700.000,00	
<b>2.4.40.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	
2.4.40.3.6.	Lain-Lain Belanja Modal Pengadaan	0,00	
<b>2.4.42</b>	<b>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>2.400.000,00</b>	
<b>2.4.42.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.400.000,00</b>	
2.4.42.2.66.	Belanja Insentif	2.400.000,00	
<b>2.4.45</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>12.650.000,00</b>	
<b>2.4.45.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.650.000,00</b>	
2.4.45.2.70.	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	7.150.000,00	
2.4.45.2.73.	Belanja Studi Kerja	5.500.000,00	
<b>2.4.51</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.4.51.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	
2.4.51.2.74.	Lain-Lain Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbel	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>961.134.700,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.000.000,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	0,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	
3.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	50.000.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Langkidi, 14 September 2018

Kepala Desa Langkidi

Muslim, S.Pi



*Sumber : Kantor Desa Langkidi, 2018*

Dari tabel diatas tampak ada lima program dalam bidang pembangunan infrastruktur desa beserta rincian dana yang digunakan. Sedangkan dalam tabel usulan ada tujuh program yang diusulkan oleh masyarakat desa, namun yang di sepakati dalam pembangunan hanya lima program saja. Program tersebut dianggap sebagai prioritas kebutuhan di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu pada tahun 2018. Selain itu yang menjadi pertimbangan adalah ketercukupan jumlah dana bila seluruh usulan program di terima.

Pada tabel diatas yang pertama ada pembangunan rabat beton yang diusulkan karena pada musim hujan jalan dusun, jalan desa, jalan tani sangat sulit dilalui karena becek dan licin (sebagian besar masih jalan tanah) dan volume dari jalanan di dusun 1,5 km, jalan desa 1,5 km dan jalan tani 3 km tapi yang akan dibangun ada 92 meter di Dusun P. Bulawang dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 104.000.000,-. Selanjutnya pembangunan talud dan pembangunan drainase yang diusulkan karena sering terjadi banjir, erosi di musim hujan, sehingga mengikis lahan kebun masyarakat dan pada musim hujan terjadi genangan air/banjir di jalanan yang mengganggu aktivitas masyarakat terkhusus kepada kelompok masyarakat tani. Volume dari talud dan drainase yang ada di Desa Langkidi 1,5 km dan untuk pembangunan talud volumenya 478 meter di Dusun Bulu-Bulu dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- dan drainase 450 meter di Dusun Langkidi dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000.

Selanjutnya pada pembangunan irigasi dan damparit yang diperlukan untuk menghindari terkikisnya jalan/bahu jalan pada musim hujan karena saluran air

tidak berfungsi maksimal masih berupa parit sehingga air hanya meresap dan melimpah kejalanan, pada musim hujan terjadi genangan air/banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat terkhusus kepada kelompok masyarakat tani, volume dari irigasi di Desa Langkidi 2 km, yang akan dibangun ada 138 meter di Dusun Bulu-Bulu dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 90.000.000,- dan untuk pembangunan damparit ada 1 unit di Dusun Langkidi dengan perkiraan pembiayaan sebesar Rp. 90.000.000,-.

### **C. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa dalam Program Pembangunan Desa di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu**

Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu bertujuan untuk menyejahterahkan warga di desa dan dicapai oleh pemerintah melalui program dari dana desa. Dana yang diberikan kepada pemerintah desa tidak tanggung-tanggung jumlahnya karena demi tercapainya tujuan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada proses perencanaan dan pelaksanaan yang efektif dan efisien dari program-program pembangunan infrastruktur yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa.

Berikut daftar laporan realisasi penyerapan Dana Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Langkidi telah membuat sembilan program dibidang pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Program tersebut telah mencakup seluruh tujuan dari program pemberdayaan masyarakat.

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Langkidi terdapat 5 program pembangunan yaitu pembangunan rabat beton, talud, irigasi, drainase dan damparit. Program pembangunan tersebut dari sebuah perencanaan yang efektif karena melibatkan masyarakat dalam rapat yang dilakukan disetiap dusun dan hasilnya dirapatkan dimusrembangdes di Desa Langkidi.

Pelaksanaan yang efektif dan efisien akan terlaksana apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanaan bisa tercapai sesuai dengan hasil yang diinginkan dan diharapkan. Berikut hasil wawancara peneliti kepada beberapa narasumber mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan.

a. Pembangunan Rabat Beton

Kebutuhan akan rabat beton tidak mungkin dapat kita abaikan. Karena adanya rabat beton dapat juga mempermudah para pekerja dalam menyelesaikan tugasnya karena kondisi lingkungan yang lebih bersih dan

tidak becek. Pembangunan rabat beton yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pembangunan yang baik dan memberikan rasa aman dan nyaman ketika masyarakat ingin melintas.

Pembangunan rabat beton merupakan fasilitas umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Melalui kebijakan dana desa pemerintah desa berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan membuat dan melaksanakan program pembangunan rabat beton di Desa Langkidi.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan rabat beton :

“Program pembangunan rabat beton di Desa Langkidi tahun 2018 ini alhamdulillah sudah efektif dan bermanfaat bagi masyarakat yang melalui rabat tersebut”. (Hasil wawancara MS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan rabat beton didesa langkidi sudah efektif, sudah dimanfaatkan oleh warga desa dan dari kondisi jalanan yang peneliti lihat di desa langkidi memang sudah sebagian yang selesai, yang lainnya masih tahap pengerjaan.

Ketua BPD Desa Langkidi pun menyatakan hal demikian mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan rabat beton seperti berikut ini :

“Iya alhamdulillah pembangunan rabat beton jalan sudah efektif sekarang disini. Sekarang sudah bisa dilewati masyarakat tanpa takut untuk becek atau banjir.” (Hasil wawancara KN, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan rabat beton jalan sudah efektif dan dapat mempermudah akses jalan

untuk masyarakat. Karena dulu memang belum baik jalanannya becek dan berlubang. Para pejalan kaki tentu merasa tidak nyaman jika jalan yang dilalui tidak aman dan nyaman untuk dilewati. Namun sekarang kebutuhan akan rabat beton jalan sudah terpenuhi. Warga Desa Langkidi dapat menikmati jalanan yang aman dan nyaman saat berjalan kaki atau beraktivitas lainnya. Selanjutnya bagaimana pemerintah dan warga desa memelihara fasilitas umum tersebut sebab segala kemungkinan kerusakan dan lainnya dapat terjadi.

Sedangkan menurut Operator Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan rabat beton :

“Pelaksanaan program pembangunan dengan menggunakan dana desa yang dibuat oleh pemerintah desa diawali dari rapat tingkat dusun dan hasilnya dirapatkan lagi dimusrembangdes sudah efektif karena masyarakat sudah nyaman menggunakan jalan yang sudah dibuat dari anggaran dana desa dan semoga pembangunan di desa kami terus berkembang” (Hasil wawancara YP, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan rabat beton didesa langkidi sudah efektif, masyarakat sudah melaluinya dengan nyaman. Kondisi jalanan yang peneliti lihat di desa langkidi memang sudah sebagian yang selesai, sudah bisa dilewati warga desa dan yang lainnya masih tahap pengerjaan.

Seperti yang dikatakan selanjutnya oleh Kadus T. Tangnga mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan rabat beton :

“ Menurut saya sudah efektif karena pelaksanaan yang pemerintah desa lakukan dari hasil rapat dusun bersama masyarakat dan direkomendasikan dalam musrembangdes. Ukuran dan kualitas pembangunan sudah memenuhi

standarisasi dalam pembuatan rabat beton di desa langkidi” (Hasil wawancara YT, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan rabat beton di desa langkidi sudah efektif dengan kualitas yang sudah memenuhi syarat demi keamanan dan kenyamanan masyarakat desa. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibangun dan dapat dilewati oleh warga desa.

Pendapat dari Kasih Kesejahteraan di kantor desa mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan rabat beton :

“Pelaksanaan yang dilakukan sudah efektif karena jalanan sudah bagus, masyarakat yang melaluinya jadi nyaman karena kami membangun rabat beton untuk kepentingan dan kebaikan bersama” (Hasil wawancara RS, 25 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan rabat beton di desa langkidi sudah efektif karena jalanan didesa langkidi sudah bisa dilewati. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibangun dan dapat dilewati oleh warga desa.

Sama halnya dengan pendapat dari Kadus Bulu-Bulu mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan rabat beton :

“Pelaksanaan yang pemerintah desa lakukan sesuai prosedur dari hasil musrembang dan saya juga yang terlibat didalamnya sebagai kadus dengan memasukkan rekomendasi dari warga untuk pembangunan desa apa saja yang diperlukan pada tahun 2018. Menurut saya sudah efektif, alasannya sangat membantu masyarakat, apalagi dengan adanya pembangunan rabat beton pekerjaan masyarakat di desa semakin lancar karena akses jalan mempermudah masyarakat untuk beraktivitas” (Hasil wawancara SS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan rabat beton di desa langkidi sudah efektif karena jalanan di desa langkidi sudah bisa dilewati dan sangat membantu pekerjaan masyarakat di desa. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibangun dan dapat dilewati oleh warga desa dan pasti sangat memperlancar pekerjaan warga desa.

Sedangkan menurut Rosmini selaku masyarakat desa langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan rabat beton :

“Sudah efektif karena saya dan warga desa lainnya sudah bisa melalui jalan tersebut dengan aman dan nyaman, kami juga tidak khawatir lagi saat kami beraktivitas karena jalanan sudah baik” (Hasil wawancara RM, 26 Oktober 2018)

Sama halnya dengan pendapat dari masyarakat Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan rabat beton :

“Sudah efektif karena masyarakat desa sudah bisa menggunakan jalan rabat beton yang dibangun”, (Hasil wawancara MM, 26 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan rabat beton di desa langkidi sudah efektif karena jalanan di desa langkidi sudah bisa dilewati masyarakat di desa. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibangun dan dapat dilewati oleh warga desa dan pasti sangat memperlancar pekerjaan warga desa.

Adapun panjang keseluruhan dari pembangunan rabat beton ialah 92 meter dari 1,5 Km dengan biaya pembangunan sebesar Rp 104.000.000 ( seratus empat juta rupiah), bentuk jalan tersebut dalam bentuk jalan dusun dan akan dibangun di

dusun P. Bulawang dengan biaya yang demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan biaya atau anggaran sudah efektif, keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat karena dilihat dari awal perencanaan masyarakat sudah dilibatkan dan juga pada saat melaksanakan pembangunan masyarakat juga dilibatkan hal ini dapat dilihat dari para pekerja yang terdapat dilokasi proyek pembangunan yakni masyarakat yang berdomisili di desa tersebut.

b. Pembangunan Talud

Pembangunan talud atau pembangunan untuk memperlebar jalan dengan cara memasang batu kali dengan cara direkatkan dengan campuran semen guna untuk menahan tanah dibelakangnya untuk mencegah longsor. Pembangunan talud awalnya direkomendasikan dikarenakan sering terjadi banjir, erosi di musim hujan, sehingga mengikis lahan kebun masyarakat dan karena itulah dimasukkan dirapat dusun dan dirapatkan lagi ke musrembangdes. Pembangunan ini masuk dalam program pembangunan talud ini adalah salah satu program yang terealisasi pada tahun 2018 dengan biaya yang berasal dari dana desa.

Adapun hasil wawancara mengenai pelaksanaan program pembangunan talud di desa langkidi pendapat dari Kepala Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan talud :

“Sudah efektif karena pelaksanaan yang kami lakukan dari perencanaan yang sudah disepakati bersama antara masyarakat, kepala dusun dan pemerintah desa dimusrembangdes. Pembangunan talud juga membantu memperlebar badan jalan disetiap desa, terhindar dari longsor saat musim hujan berlangsung karena tingkat kestabilan tanah kami masih belum stabil” (Hasil wawancara MS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan talud di desa langkidi sudah efektif karena memperlebar jalanan didesa. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibuatkan talud dan sebagiannya masih dalam pengerjaan.

Ketua BPD Desa Langkidi pun menyatakan hal demikian mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan talud seperti berikut ini :

“Kami selaku pemerintah desa melaksanakan apa yang disepakati warga desa dalam musrembang dengan membantu memperlebar jalan dan mampu menahan tanah warga agar tidak longsor dan merusak lingkungan warga” (Hasil wawancara KN, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan talud desa sudah efektif karena membantu memperlebar jalan dan membuat masyarakat aman dan nyaman saat melaluinya. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibuatkan talud dan sebagiannya masih dalam pengerjaan.

Sedangkan menurut Operator Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan talud:

“Saya rasa pelaksanaan program pembangunan di desa langkidi sudah efektif karena pembangunan yang dilakukan dari apa yang dibutuhkan warga desa dan mempermudah masyarakat menggunakan jalan yang disampingnya dibangun talud agar tidak longsor yang dapat merusak pinggiran jalanan yang ada di desa” (Hasil wawancara YP, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan talud desa sudah efektif karena memudahkan masyarakat desa saat

melewati jalanan. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibuatkan talud dan sebagiannya masih dalam pengerjaan.

Seperti yang dikatakan selanjutnya oleh Kadus T. Tangnga mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan talud :

“Menurut saya selaku kadus dalam pelaksanaan program pembangunan sudah sesuai prosedur dan pembangunan dilakukan dari hasil rapat antara masyarakat, pemerintahan desa dan sudah efektif karena selain jalan sudah lebar juga mencegah jalanan di desa amblas oleh hujan” (Hasil wawancara YT, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan talud desa sudah efektif karena mampu mencegah longsonya jalanan dikarenakan kondisi jalanan belum seimbang atau labil. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibuatkan talud dan sebagiannya masih dalam pengerjaan.

Pendapat dari Kasih Kesejahteraan di kantor desa mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan talud :

“Pelaksanaan yang dilakukan menurut saya sudah efektif karena program pembangunan tahun 2018 dari hasil rapat dusun dan dilanjutkan dimusrebangdes. Dari hasil pembangunan talud membuat saluran air kesawah sudah layak, jalanan didesa terlihat bagus dengan adanya talud dan terhindar dari longsor” (Hasil wawancara RS, 25 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan talud desa sudah efektif karena membuat saluran air kesawah menjadi bagus dan lancar. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibuatkan talud dan sebagiannya masih dalam pengerjaan.

Sama halnya dengan pendapat dari Kadus Bulu-Bulu mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan talud :

“Pelaksanaan menurut saya sudah efektif karena kami melakukan pembangunan atas dasar kebutuhan desa dan warga desa dari rapat dimusrembangdes. Pembangunan talud sangat penting karena selain sebagai penahan longsor disetiap jalan yang ada didesa juga sangat indah dilihat apabila ditiap jalan ada taludnya” (Hasil wawancara SS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan talud desa sudah efektif karena mampu menahan longsor akibat kondisi jalanan yang belum stabil dan juga membuat jalan di desa menjadi indah dipandang oleh warga desa. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibuatkan talud dan sebagiannya masih dalam pengerjaan.

Sedangkan menurut masyarakat di desa langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan talud :

“Pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa sudah efektif karena pembangunan yang dilakukan dari hasil masukan warga dirapat di dusun dan dengan adanya pembangunan talud didesa langkidi jalanan terlihat bagus dan enak dilewati ” (Hasil wawancara RM, 26 Oktober 2018)

Sama halnya dengan pendapat dari masyarakat Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan talud :

“Sudah efektif karena masyarakat desa sudah bisa menggunakan talud yang dibangun”, (Hasil wawancara MM, 26 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan talud desa sudah efektif karena mampu menahan longsor akibat kondisi jalanan yang belum stabil dan juga membuat jalan didesa menjadi indah dipandang oleh warga desa. Kondisi jalan di desa langkidi memang sudah sebagian dibuatkan talud dan sebagiannya masih dalam pengerjaan.

Adapun panjang keseluruhan dari pembangunan talud adalah 478 meter dari 1,5 Km dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah), dan akan dibangun di Dusun Bulu-Bulu dengan biaya yang demikian dapat di katakan bahwa pemanfaatan biaya atau anggaran sudah efektif, keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat karena dilihat dari awal perencanaan masyarakat sudah dilibatkan dan juga pada saat melaksanakan pembangunan masyarakat juga dilibatkan hal ini dapat di lihat dari para pekerja yang terdapat di lokasi proyek pembangunan yakni masyarakat yang berdomisili di desa tersebut.

#### c. Pembangunan Drainase

Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembangunan drainase ini diusulkan warga dirapat dusun dan diteruskan kemusrembangdes karena sering terjadi banjir, erosi di musim hujan, sehingga mengikis lahan kebun masyarakat dan pada musim hujan terjadi genangan air/banjir dijalanan yang mengganggu aktivitas masyarakat terkhusus kepada kelompok masyarakat tani dan pembangunan ini dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau

mengalihkan air. Program pembangunan drainase ini adalah salah satu program yang terealisasi pada tahun 2018 dengan biaya yang berasal dari dana desa.

Berikut pendapat dari Kepala Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase :

“Menurut saya selaku Kepala Desa Langkidi mengenai pelaksanaan dalam program pembangunan drainase di Dusun Langkidi pada tahun 2018 dilakukan karena adanya kesepakatan dalam rapat musrembangdes, saya selaku Kepala Desa menerima masukan itu karena usulan dari kepala dusun yang disampaikan masyarakat lewat rapat dusun dan pelaksanaan yang saya lakukan sudah sesuai prosedur dan sudah efektif karena menjadi saluran pembuangan air limbah atau got untuk masyarakat ” (Hasil wawancara MS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan drainase desa sudah efektif karena desa langkidi mempunyai saluran pembuangan air limbah atau got. Kondisi drainase di desa langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam pengerjaan.

Ketua BPD Desa Langkidi pun menyatakan hal demikian mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase seperti berikut ini :

“Pelaksanaan program pembangunan drainase dilakukan sesuai prosedur, usulan kebutuhan dari warga desa yang dibawa pada rapat musrembangdes dan dibangun demi kepentingan desa dan masyarakat desa. Pembangunan drainase di desa langkidi menurut saya juga sudah efektif dan saya menghimbau kepada masyarakat desa untuk melaporkan seandainya ada drainase yang bermasalah sehingga bisa segera ditangani” (Hasil wawancara KN, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan drainase desa sudah efektif dan Ketua BPD menghimbau kepada warganya untuk melaporkan jika terjadi masalah pada drainase. Kondisi drainase

di Desa Langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan.

Sedangkan menurut Operator Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase:

“Salah satu program yang diusulkan lagi tahun 2018 adalah pembangunan drainase. Dan telah direalisasikan di Dusun Langkidi, drainase dibangun disana untuk membantu mengurangi bahkan mengatasi bencana banjir bila musim hujan tiba” (Hasil wawancara YP, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan drainase desa sudah efektif karena tidak mengakibatkan banjir didesa, air kesawah jadi lancar karena adanya drainase yang dibangun didesa. Kondisi drainase di Desa Langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan.

Seperti yang dikatakan Kadus T. Tangnga mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase :

“Menurut saya pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa dari usulan pada rapat musrembangdes dan itu semua dari kebutuhan desa dan warga desa yang dikerjakan sesuai volume pembangunan dan dana yang dibutuhkan. Pembangunan menurut saya sudah efektif karena mencegah genangan air” (Hasil wawancara YT, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan drainase desa sudah efektif karena membuat desa langkidi tidak tergenang oleh air hujan. Kondisi drainase di desa langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan.

Pendapat dari Kasih Kesejahteraan dikantor desa mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase :

“Pendapat saya sama seperti pendapat para narasumber yang lain untuk pelaksanaan pembangunan drainase sudah sesuai prosedur dari hasil rapat tingkat dusun, disampaikan dirapat musrembangdes dan menurut saya sudah efektif dikarenakan tidak adanya lagi genangan air dan membuat desa mempunyai saluran air yang bagus” (Hasil wawancara RS, 25 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan drainase desa sudah efektif karena membuat desa langkidi tidak tergenang oleh air hujan karena mempunyai saluran air yang bagus. Kondisi drainase di desa langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan.

Sama halnya dengan pendapat dari Kadus Bulu-Bulu mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase :

“Pelaksanaan yang kami lakukan sesuai prosedur karena melibatkan warga, pemerintah desa dan saya pikir sudah efektif, karena demi lancarnya air / mencegah genangan air agar tidak jadi tempat berkembang biaknya nyamuk yang bisa menimbulkan penyakit” (Hasil wawancara SS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan drainase desa sudah efektif karena membuat desa langkidi terhindar dari genangan air yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit untuk warga desa dan terhindar dari berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Kondisi drainase di desa langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan.

Sedangkan menurut masyarakat desa langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase :

“Pelaksanaan pembangunan yang Pemerintah Desa buat sudah efektif karena melibatkan kami sebagai warga, menerima masukan dari warganya dan membangun kebutuhan untuk desa dan warganya. Dengan adanya drainase membuat tidak adanya lagi genangan air di Desa dan membuat warga tidak khawatir lagi jika musim hujan” (Hasil wawancara RM, 26 Oktober 2018)

Sama halnya dengan pendapat dari masyarakat Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase :

“Sudah efektif karena masyarakat desa sudah bisa menggunakan drainase yang dibangun”, (Hasil wawancara MM, 26 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan drainase desa sudah efektif karena membuat masyarakat nyaman jika musim hujan datang. Kondisi drainase di desa langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan.

Adapun panjang keseluruhan dari pembangunan drainase adalah 450 meter dari 1,5 Km dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 200.000.000 ( duaratus juta rupiah), dan akan dibangun di Dusun Langkidi dengan biaya yang demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan biaya atau anggaran sudah efektif, keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat di rasakan oleh masyarakat setempat karena dilihat dari awal perencanaan masyarakat sudah dilibatkan dan juga pada saat melaksanakan pembangunan masyarakat juga dilibatkan hal ini dapat di lihat dari

para pekerja yang terdapat di lokasi proyek pembangunan yakni masyarakat yang berdomisili di desa tersebut.

#### d. Pembangunan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Pada musim hujan terjadi genangan air/banjir di jalanan yang mengganggu aktivitas masyarakat terkhusus kepada kelompok masyarakat tani di Dusun Bulu-Bulu.

Berikut pendapat Kepala Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan irigasi:

“Program pembangunan irigasi disini sudah terealisasi. Irigasi yang dibangun itu dari hasil rapat dengan masyarakat dimusrembangdes karena seringnya terjadi banjir pada saat musim hujan, menyusahkan para petani di dusun Bulu-Bulu karena tidak adanya irigasi dan pembangunan irigasi didesa sudah efektif karenakan masyarakat apalagi yang bertani tidak memikirkan lagi banjir ketika musim hujan berlangsung” (Hasil wawancara MS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan irigasi desa sudah efektif karena irigasi itu penting untuk menghindari banjir saat musim hujan dan mengalirkan air ke sawah-sawah warga. Kondisi irigasi di desa langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan.

Ketua BPD Desa Langkidi pun menyatakan hal demikian mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan irigasi seperti berikut ini :

“Warga Desa sangat terbantu dengan adanya Dana Desa ini sebagai salah satu bukti konkrit adalah program pembangunan irigasi yang sangat bermanfaat bagi warga Desa. Seperti saat musim hujan dan akibatnya terjadi banjir di jalan dan disawah para petani karena tidak adanya irigasi di Dusun Bulu-Bulu” (Hasil wawancara KN, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan irigasi desa sudah efektif karena mampu membuat air mengalir dengan lancar, teratur dan sangat membantu buat para petani. Kondisi irigasi di Desa Langkidi memang sudah sebagian selesai dan sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan.

Sedangkan Operator Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan irigasi:

“Iya ada pembangunan irigasi disini, dekat dengan lahan pertanian warga. Dengan adanya irigasi ini warga lain yang juga petani tidak kesulitan lagi dalam bertanian saat musim panen tiba. Selain itu, saya merasa irigasi ini dapat mengurangi dampak gagal panen. Sebab, sebelum adanya irigasi ini saat musim hujan sering terjadi banjir dan membuat sawah warga terendam oleh air hujan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mendingan dikarenakan adanya pembangunan irigasi” (Hasil wawancara YP, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan irigasi Desa sudah efektif karena bisa membantu para petani di Desa dan diharapkan dapat memperbaiki tingkat pendapatan petani karena kebanyakan masyarakat di Desa adalah petani. Kondisi irigasi di Desa Langkidi memang sudah sebagian selesai, sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan dan semoga bermanfaat untuk para petani di Desa.

Seperti yang dikatakan selanjutnya oleh Kadus T. Tangnga mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan irigasi :

“Salah satu program dana desa yang disepakati dalam musrembangdes adalah program pembangunan irigasi. Masyarakat di Dusun Bulu-Bulu sudah merasakan manfaatnya, yang dulunya sering banjir, sekarang jalanan dan sawah para petani sudah bagus tidak seperti dulu saat musim hujan terjadi” (Hasil wawancara YT, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan irigasi Desa sudah efektif karena bisa membantu para petani di Desa dan diharapkan dapat memperbaiki tingkat pendapatan petani karena kebanyakan masyarakat di Desa adalah petani. Kondisi irigasi di Desa Langkidi memang sudah sebagian selesai, sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan dan semoga bermanfaat untuk para petani di Desa.

Pendapat dari Kasih Kesejahteraan di Kantor d\Desa mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan irigasi :

“Program pembangunan irigasi sudah direalisasikan di Dusun Bulu-Bulu. Karena irigasi merupakan hal yang penting agar tidak terjadi lagi banjir saat musim hujan berlangsung dan pembangunan irigasi juga menyelamatkan warga yang bertani karena sawah warga mempunyai irigasi untuk mencegah banjir disawah mereka.” (Hasil wawancara RS, 25 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan irigasi Desa sudah efektif karena bisa membantu para petani di Desa dan diharapkan dapat memperbaiki tingkat pendapatan petani karena kebanyakan masyarakat di Desa adalah petani. Kondisi irigasi di Desa Langkidi

memang sudah sebagian selesai, sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan dan semoga bermanfaat untuk para petani di Desa.

Sama halnya dengan pendapat Kadus Bulu-Bulu mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan irigasi :

“Seluruh jajaran pemerintah desa sebagai pengelola Dana Desa sangat berupaya bagaimana agar dana tersebut dapat dirasakan manfaatnya dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat Desa. Kami berusaha agar dana hanya berputar-putar di Desa saja. Seperti pembangunan irigasi yang mampu membantu para petani dalam bertani tanpa takut banjir di sawah saat musim hujan” (Hasil wawancara SS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan irigasi desa sudah efektif karena di Desa Langkidi kebanyakan petani dan ada juga masyarakat yang membuat empang untuk usaha ternak ikan. Kondisi irigasi di Desa Langkidi memang sudah sebagian selesai, sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan dan semoga bermanfaat untuk para petani di Desa.

Sedangkan menurut Rosmini selaku masyarakat Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan irigasi :

“Iya memang benar warga disini juga dilibatkan dalam kegiatan pembangunan irigasi yang diprogramkan di Dusun Bulu-Bulu. Pelibatan tersebut melalui kerja borongan yang diberikan kepada warga lokal. Karena warga disini sebagian besar memiliki kemampuan yang cukup baik dalam hal kerja bangunan, sehingga tidak ragu bagi kami untuk memberikan proyek-proyek dalam Desa kepada warga lokal. Mengingat program dari Dana Desa ini memang harus dilaksanakan secara swakelola” (Hasil wawancara RM, 26 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan irigasi sudah efektif dan dilakukan oleh warga desa sendiri karena

sebagian besar warga desa mempunyai kemampuan untuk membangun. Kondisi irigasi di Desa Langkidi memang sudah sebagian selesai, sebagiannya masih dalam tahap pengerjaan dan semoga bermanfaat untuk para petani didesa.

Sama halnya dengan pendapat dari masyarakat Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan irigasi :

“Sudah efektif karena masyarakat desa sudah bisa menggunakan jalan irigasi yang dibangun”, (Hasil wawancara MM, 26 Oktober 2018).

Adapun panjang keseluruhan dari pembangunan irigasi adalah 138 meter dari 2 Km dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 90.000.000,- ( Sembilanpuluh juta rupiah), dan akan dibangun di Dusun Bulu-Bulu dengan biaya yang demikian dapat di katakan bahwa pemanfaatan biaya atau anggaran sudah efektif, keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat karena dilihat dari awal perencanaan masyarakat sudah dilibatkan dan juga pada saat melaksanakan pembangunan masyarakat juga dilibatkan hal ini dapat di lihat dari para pekerja yang terdapat di lokasi proyek pembangunan yakni masyarakat yang berdomisili di Desa Langkidi.

#### e. Pembangunan Damparit

Dam parit (*channel reservoir*) adalah teknologi sederhana yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor. Tujuan dibangunnya damparit didusun langkidi untuk menampung volume aliran permukaan, sehingga selain dapat digunakan untuk mengairi lahan disekitarnya juga dapat menurunkan kecepatan run off, erosi dan sedimentasi.

Berikut pendapat dari Kepala Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan damparit :

“Pelaksanaan program pembangunan damparit di Dusun Langkidi belum bisa diketahui keefektifannya tapi program pembangunan damparit pada saat musrembangdes sudah disepakati bersama dan karena pembangunan damparit saat sekarang belum terlaksana dan insyaallah akan dilaksanakan pertengahan bulan 12 ” (Hasil wawancara MS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan damparit belum bisa diketahui sudah efektif atau tidak tapi pasti program pembangunan damparit di Desa yang direncanakan akan berguna nantinya untuk warga Desa Langkidi.

Bapak Ketua BPD Desa Langkidi pun menyatakan hal demikian mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan damparit seperti berikut ini :

“Program pembangunan damparit rencananya dilaksanakan pertengahan bulan 12 dan hasilnya akan diketahui ketika sudah terlaksana” (Hasil wawancara KN, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan damparit belum bisa diketahui sudah efektif atau tidak tapi pasti program pembangunan damparit didesa yang direncanakan akan berguna nantinya untuk warga Desa Langkidi.

Sedangkan menurut Operator Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan damparit:

“Belum bisa dikasih penjelasan karena baru dalam perencanaan tapi insyaallah nantinya bisa bermanfaat untuk warga desa” (Hasil wawancara YP, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan damparit belum bisa diketahui sudah efektif atau tidaknya tapi pasti akan berguna nantinya untuk warga desa karena setiap program pasti ada manfaatnya.

Seperti yang dikatakan selanjutnya oleh Kadus T. Tangnga mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan damparit :

“Belum ada pembangunan, baru perencanaan” (Hasil wawancara YT, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan damparit belum bisa diketahui sudah efektif atau tidaknya dikarenakan masih dalam bentuk perencanaan karena perencanaan itu penting untuk memulai sesuatu yang ingin dilakukan agar lancar ketika dikerjakan.

Pendapat dari bapak Kasih Kesejahteraan di Kantor Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan damparit :

“Baru perencanaan” (Hasil wawancara RS, 25 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan damparit belum bisa diketahui sudah efektif atau tidaknya dikarenakan masih dalam perencanaan, belum ada pengerjaan tapi pasti nantinya akan dibangun karena sudah diprogramkan oleh Pemerintah Desa.

Sama halnya dengan pendapat dari bapak Kadus Bulu-Bulu mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan damparit :

“Belum diketahui karena damparit di Desa Langkidi masih dalam tahapan perencanaan pembangunan” (Hasil wawancara SS, 24 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan damparit belum bisa diketahui sudah efektif atau tidaknya dikarenakan masih dalam perencanaan, belum ada pengerjaan tapi pasti nantinya akan dibangun karena sudah diprogramkan oleh Pemerintah Desa.

Sedangkan menurut Rosmini selaku masyarakat Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan Dana Desa dalam program pembangunan drainase :

“Belum tau karena belum ada pembangunan damparit di Desa Langkidi” (Hasil wawancara RM, 26 Oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembangunan damparit belum bisa diketahui sudah efektif atau tidaknya dikarenakan masih dalam perencanaan, belum ada pengerjaan tapi pasti nantinya akan dibangun karena sudah diprogramkan oleh Pemerintah Desa.

Sama halnya dengan pendapat dari masyarakat Desa Langkidi mengenai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam efektivitas penggunaan dana desa dalam program pembangunan drainase :

“Belum saya tau karena belum dibuat tapi insyaallah pasti berguna untuk masyarakat desa”, (Hasil wawancara MM, 26 Oktober 2018).

Adapun panjang keseluruhan dari pembangunan damparit adalah 1 Unit dengan biaya pembangunan sebesar Rp. 90.000.000,- ( Sembilanpuluh juta rupiah), dan akan dibangun di Dusun Langkidi dengan biaya yang demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan biaya atau anggaran sudah efektif, keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat setempat karena dilihat dari awal perencanaan masyarakat sudah dilibatkan dan juga pada saat melaksanakan pembangunan masyarakat juga dilibatkan hal ini dapat dilihat dari para pekerja yang terdapat di lokasi proyek pembangunan yakni masyarakat yang berdomisili di desa tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berlandaskan latar belakang masalah maka kesimpulan dalam penelitian ini yang telah dilakukan oleh penulis mengenai proses dan efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu”

1. Dengan melakukan perencanaan yang matang dalam pembangunan infrastruktur Desa dengan melalui masukan dari warga dalam rapat tingkat dusun dan hasil dari rapat tersebut dimasukkan didalam rapat musrembangdes dapat memudahkan segala program pembangunan, untuk menyejahterahkan masyarakat desa dan kondisi di Desa Langkidi memang masih dalam proses pembangunan infrastruktur.
2. Dalam pelaksanaan program dibidang pembangunan infrastruktur di Desa Langkidi dilihat dari jumlah program yang direncanakan pada tahun 2018 sebagian besar telah terealisasi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi program berjalan dengan sangat efektif, karena hampir seluruh program dapat terealisasi dengan baik. Meskipun masih ada satu program pembangunan yang baru akan dilaksanakan namun sebagian program dapat direalisasikan dengan baik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu dalam hal perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam penggunaan dana desa dibidang pembangunan infrastruktur desa :

1. Dalam proses perencanaan program pembangunan di Desa Langkidi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk membantu dalam penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih berpartisipasi atau terlibat aktif dalam perencanaan program-program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Langkidi diharapkan pemerintah Desa Langkidi dapat bekerja sama baik dengan masyarakat desa agar seluruh masyarakat desa bisa berpartisipasi dan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa Langkidi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, Elgia (2011). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Didesa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) Vol 1 No 1 Jurnal Ekonomi
- Babeng, Moh. Ikbal (2018). Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Dikecamatan Balantak Kabupaten Banggai. Vol 6 No 1 Jurnal IUS
- Dahlan, Indrasto Wahyudi (2012). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan (PIIP) Didesa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Vol 2 No 1 Jurnal Pemerintahan Desa.
- Hafid, Risma (2016). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Hanifah, Suci Indah (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES). Vol 4 No 8. Jurnal Pemerintahan Desa
- Hendra (2018) Analisis Kualitas SDM dan Motivasi Terhadap Efektivitas Kepemimpinan Camat Dikecamatan Tanralili Kabupaten Maros Vol 3 No 1. Jurnal Stieamkop
- Hidayati, Emy (2013). Efektivitas KKN Tematik Pos Daya Berbasis Masjid Bagi Pemberdayaan Masyarakat. Vol 12 No 2 Jurnal Ar-Risalah
- Listyaningsih, Enik (2017). Efektivitas Program Bina Keluarga Lansia (BKL) Dalam Membina Lansia Dikecamatan Godean Sleman Yogyakarta. Vol 5 no 1 Jurnal Efectivinees.
- Miskawati (2016). Peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Didesa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu) Vol 1 No 1 Jurnal Pembangunan Desa.
- Peraturan Bupati Luwu Nomer 6 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa mengenai penggunaan dana desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007
- Prayamita, Susi Eka (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Didesa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

- Riyanto, Teguh (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dikantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Vol 3 No 1. Ejournal Administrasi Negara
- Satiti, Nadira Emmelia (2018). Pengaruh Media Sosial dan Teknologi Sebagai Strategi Pemasaran Yang Efektif Dalam Menarik Minat Wisatawan Pantai Ngalambor Gunung Kidul. Vol 6 No 2 Jurnal STPSS
- Subroto, Agus (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didesa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. Tesis Program Studi Magister Sains Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D. Yogyakarta : Rajawali Pers.
- Syafrudin (2017). Analisis Efektivitas Kegiatan Dan Efisiensi Anggaran Perpolisian Masyarakat (Polmas) Pada Sektor Kecamatan Talibang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010-2014. Vol 2 No 1 Jurnal Ekonomi
- Syaodih, Ernady (2015). Management Pembangunan Kabupaten Dan Kota. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Tahir, Arifn (2011). Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT. Pustaka Indonesia Pers.
- Tjokrowinoto, Moeljarto (2012). Pembangunan Dilema Dan Tantangan. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- TSL, Octrian (2013). Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Didesa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Vol 3 No 1. Jurnal Pemerintahan
- UUD No. 6 Tahun 2014 tentang desa
- UUD No. 32 tahun 2004



# LAMPIRAN



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dr : 122/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018

09 Safar 1440 H

1 (satu) Rangkap Proposal

18 October 2018 M

Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Luwu

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas  
di -

Luwu

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1701/FSP/A.1-VIII-X/1439 H/2018 M tanggal 18 Oktober 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **BASRI AMAT**  
No. Stambuk : **10564 01878 14**  
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**  
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Langkiddi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober 2018 s/d 20 Desember 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**

**NBM 101 7716**



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 382/PENELITIAN/07.12/DPMPTSP/X/2018  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Desa Langkiddi  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar : 122/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Basri Amat  
Tempat/Tgl Lahir : Jambu / 14 November 1995  
Nim : 10564 01878 14  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jambu  
Desa Jambu  
Kecamatan Bajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LANGKIDDI KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA LANGKIDDI**, pada tanggal **22 Oktober 2018 s/d 22 November 2018**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

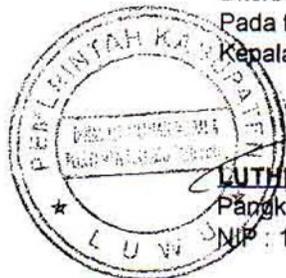
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



201819315000189



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 22 Oktober 2018  
Kepala Dinas



**LUTHER BIJA, SH, MH**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19630617 199203 1 010

embusan :

. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;

. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN BAJO  
DESA LANGKIDI**

*Alamat : Desa Langkidi Kec. Bajo Kab. Luwu Kode Pos 91995*

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 703/DL-BJ/X/2018

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini ,Kepala Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Menerangkan Dengan Sesungguhnya Bahwa:

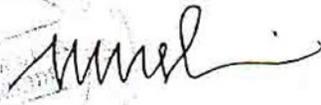
**Nama : BASRI AMAT**  
**Tempat Dan Tanggal Lahir : Jambu, 14-11-1995**  
**Pekerjaan : Mahasiswa**  
**Agama : Islam**  
**Nim : 105640187814**  
**Alamat : Desa Jambu Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu**

Oknum Tersebut Diatas Telah Melaksanakan Penelitian Di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Dalam Rangka Menyusun Skripsi Dengan Judul **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA LANGKIDI, KECAMATAN BAJO KAB. LUWU"** Mulai Tanggal 22 Oktober 2018 S/D 22 November 2018

Demikian Surat Keterangan Ini Kami Buat Dengan Sebenarnya Dan Diberikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dipergunakan Sebagai Mestinya.

Langkidi 22 November 2018

Kepala Desa Langkidi

  
MUSLIM S.PI

## RIWAYAT HIDUP



**Basri Amat**, lahir pada tanggal, 14 November 1995 di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Anak ke Tiga dari Empat bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan suami istri M. Amat Lonjo dan Hamri.

Penulis mulai memasuki dunia pendidikan Taman Kanak (TK) pada Tahun 2000 di TK Nurul Falah Kota Makassar dan tamat pada tahun 2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat dasar pada Tahun 2001 di SDN Labuang Baji I Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan tamat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Tahun 2007 di SMP Negeri 24 Makassar Kelurahan Bungaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan tamat pada tahun 2010. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Tahun 2010 di SMA Nasional Makassar Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar dan berhasil menamatkan studinya di sekolah pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima di Jurusan

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Strata 1.

Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studinya dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Insfrastruktur di Desa Langkidi Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

